

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2017). Akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah: semu atau nyata?. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 21 (2), 105.
- Artaningtyas, W. D., Syari'udin, A., & Maryani, T. (2011). Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Buletin Ekonomi*, 9(1), 51-58.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan. (2018). Kabupaten Humbang Hasundutan Dalam Angka 2018. Diakses pada 19 Mei 2022, dari (<https://humbanghasundutankab.bps.go.id/publication/2018/08/16/0b64358b90687ef163d56833/kabupaten-humbang-hasundutan-dalam-angka-2018.html>).
- Badan Pusat Statistik. (2014) Indeks Pembangunan Manusia 2014 (Metode Baru). Dikutip dalam (<https://kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/254a4-ipm-2014-bps.pdf>).
- Badan Pusat Statistik. (2021). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2021 mencapai 72,29, meningkat 0,35 poin (0,49 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (71,94). Diakses pada 19 Mei 2022, dari (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/12/15/1758/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-pada-tahun-2020-mencapai-71-94.html>).
- Barusman, T. M., SE, M., Pratiwi, T. R., SE, M., & Fitriani, K. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung Periode 2013-2015. *Sumber*, 74(27), 74-98.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Berita Resmi Statistik BPS Republik Indonesia tahun 2021.
- Bourke, L., & Geldens, P. (2007). What does wellbeing mean?: Perspectives of wellbeing among young people & youth workers in rural Victoria. *Youth Studies Australia*, 26(1), 41-49.
- Colebatch, H. (2009). *Policy*. McGraw-Hill Education (UK)

- Dewi, N., Yusuf, Y., & Iyan, R. Y. (2017). Pengaruh Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau (Doctoral Dissertation, Riau University).
- dukcapil.kemendagri. 2022. Dukcapil Kemendagri Ajak Masyarakat Perbaiki Data KTP, KK dan Akta Lahir yang Salah Tulis. Diakses pada 17 Februari 2023, dari (<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/999/dukcapil-kemendagri-ajak-masyarakat-perbaiki-data-ktp-kk-dan-akta-lahir-yang-salah-tulis>)
- Dwiyandari, L. D. Y., & Badera, I. D. N. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan pada Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3), 1741-1770.
- Epstein, P. D., & Fass, S. (1987). Government Performance What is Government Performance?. *National Civic Review*, 76(2), 137-137.
- Esteva, G. (2010). What is Development?. In *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*.
- Firdausy, S., & Hanifah, U. N. (2018). PERMASALAHAN MANAJEMEN KINERJA DI INDONESIA DAN UPAYA KEMENTERIAN PANRB UNTUK MENGATASINYA. *DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN*
- Fitriyanti, S., Pradana, H. A., & Anwar, M. A. (2019). Strategi Percepatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(2), 171-181.
- H. Ozgun A., Mehves T., Dursun D., & Zaim, Selim. (2022). Social capital and organizational performance: The mediating role of innovation activities and intellectual capital. *Healthcare Analytics 2 (2022) 100046*.
- Hadi, S., 2015. Metodologi Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Harliyani, E. M., & Haryadi, H. (2016). Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 3(3), 129-140.
- hdr.undp.org. *Human Development Report 2020. The next frontier: Human development and the Atntropocene*. (<https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf>).
- hdr.undp.org. Human Development Reports. Diakses pada 19 Mei 2022, dari (<https://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi>).

- Idrus, M. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kuantitatif dan Kuantitatif)*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta
- Juliarini, A. (2018). Kinerja Pendapatan Daerah Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. *Simposium Nasional Keuangan Negara, 1(1)*, 934-957.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Tahun 2021.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora Tahun 2021.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Tahun 2021.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora Tahun 2021.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora Tahun 2021.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Blora Tahun 2021.
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Blora Tahun 2021.
- Latuconsina, Z. M. Y. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia Kabupaten Malang berbasis pendekatan perwilayahan dan regresi panel. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan), 1(2)*, 202-216.
- Makinson, D. C. (1965). The paradox of the preface. *Analysis, 25(6)*, 205-207.
- Mirza, D.S. (2012). Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal, 1(2)*.
- Muhtar, M., & Amarullah, R. (2018). Sebuah Paradoks: Opini WTP dan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Borneo Administrator, 14(2)*, 135-150.
- Muliza, M., Zulham, T., & Sefarita, C. (2017). Analisis pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, tingkat kemiskinan dan PDRB terhadap IPM di provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec, 3(1)*, 51-69.

- Nasution, A. P. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 8(2), 15-25.
- Ningsih, SW, Yusuf, M., & Andayani, TD (2023, Januari). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Prosiding University Research Colloquium (hlm. 863-880).
- Nitami, Y. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan) (Disertasi Doktor, POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA).
- Noor, M., 2015. Memotret Data Kualitatif Untuk Tugas Akhir Mahasiswa. Semarang: CV. Duta Nusindo Semarang.
- Nurjaman, K. (2014). Manajemen personalia
- Palenewen, T. O., Walewangko, E. N., & Sumual, J. I. (2018). Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap IPM dan dampaknya terhadap kemiskinan di sulawesi utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4).
- Peraturan daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2021-2026.
- Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah. (<https://jdih.go.id/files/963/2020PERMENDAGRI38.pdf>).
- Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
- PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan.
- Prastowo, A. 2016. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta:AR-RUZZ MEDIA.
- Pratowo, N. I. (2012). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia*, 1(1), 15-31.

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2022.
- Sari, I. A. C. Y., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(3), 2409-2438.
- Sayd, G. A., Gana, F., & Kase, P. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Kinerja Kantor Pertanahan Rote Ndao. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(3), 264-274.
- Sedarmayanti, S. (2020). Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Kinerja dan Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik Di era Baru Pemerintahan. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 8(1), 1-16.
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Tahun 2021.
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Tahun 2021.
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora Tahun 2021.
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora Tahun 2021.
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora Tahun 2021.
- Stanton, E. A. (2007). The human development index: A history. *PERI Working Papers*, 85.
- Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Bisnis. Bandung:CV Alfabeta.
- Suryani, N. K., & FoEh, J. E. (2018). Kinerja Organisasi. Deepublish.
- Sutjipto, H. (2006). Sinergitas Pembangunan Daerah dalam Meningkatkan IPM di Jawa Barat. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 22(4), 479-495.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

- UNDP (United Nations Development Programme). 1990. Human Development Report 1990: Concept and Measurement of Human Development. New York.
- UNDP (United Nations Development Programme). 2010. Human Development Report 2010: The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development. New York.
- UNDP (United Nations Development Programme). 2019. Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century. New York.
- UNDP (United Nations Development Programme). 2020. Human Development Report 2020: The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene. New York.
- Van Thiel, S., & Leeuw, F. L. (2002). The performance paradox in the public sector. *Public performance & management review*, 25(3), 267-281.
- VESTIKOWATI, E. (2016). Pelaksanaan Program Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Oleh Pemerintah Desa Di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 813-822.
- Wello, Y. L. (2014). Kualitas Kinerja Organisasi Pemerintahan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(3), 17-22.
- Wijayanti, W. (2022). Kajian Daya Beli Masyarakat Kabupaten Bogor Tahun 2021. *BINA: JURNAL PEMBANGUNAN DAERAH*, 1(1), 44-54.
- Winarti, A., & Purwanti, E. Y. (2014). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kemiskinan, dan PDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 1992-2012 (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Yanti, IS, Ilham, M., Effendy, K., & Lukman, S. (2020). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Target Indeks Pembangunan Manusia Sulit Tercapai: Analisis Lingkungan Strategis. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Kabupaten*, 12 (2), 1-19.
- Zerwas, F. K., & Ford, B. Q. (2021). The paradox of pursuing happiness. *Current Opinion in Behavioral Sciences*, 39, 106-112.
- Zulyanto, A. (2016). Pengeluaran Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(2).